

Sabtu, 6 Agustus 2011

Bupati Akui Selisih Realisasi APBD 2010



BUPATI RIA NORSAN MENYERAHKAN JAWABAN BUPATI KEPADA WAKIL KETUA DPRD, RUSLI ABDULLAH, ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD. FOTO PISA

Mempawah, BERKAT.

Sempat diskor sehari, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pontianak dengan

Jawaban Bupati Pontianak, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD tentang

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010, kembali dilanjutkan, pagi kemarin.

Pada kesempatan itu, Bupati Ria Norsan membacakan 15 poin jawaban/penjelasan terhadap beberapa PU Fraksi DPRD, diantaranya perbedaan penyajian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan ke DPRD dengan hasil audit BPK, dimana laporan realisasi APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, memang terdapat selisih.

"Selisih tersebut merupakan perbedaan pengakuan pendapatan, antara laporan keuangan Pemkab Pontianak sebelum diaudit dan hasil pemeriksaan BPK. Bahwa selisih Rp 540.200.611,98, pada awalnya dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada pos lain-lain penerimaan," katanya.

Kemudian, hasil audit BPK dikoreksi sebagai bagian SILPA yang dimasukkan pada pos mutasi saldo kas pada laporan

arus kas per 31 Desember 2009, sementara SILPA per 31 Desember 2009 tetap diakui sejumlah Rp 23,97 miliar.

"Perbedaan tersebut menyebabkan kelebihan pengakuan pendapatan pada pendapatan asli daerah pada pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sementara dalam SILPA Tahun 2010 terjadi kurang catat sejumlah tersebut di atas," imbuhnya.

Dana sejumlah Rp 540.200.611,98 tersebut, lanjut bupati, merupakan alat bukti persidangan kasus dana reboisasi (PSDH) yang ada pada rekening pada Bank Kalbar Mempawah dengan nomor rekening 5001009148 yang dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2010, kemudian dari kas daerah disetorkan kembali ke Kementerian Kehutanan pada tanggal yang sama. "Terhadap kekeliruan tersebut telah diperbaiki dan dilampirkan pada jawaban ini," ujarnya.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD, H. Rusli Abdullah, SE, memberikan penjelasan terkait tidak quorumnya rapat paripurna sebelumnya. Ia mengatakan, tidak ada aksi boikot dari para anggota DPRD.

"Kedua fraksi memang sudah menyatakan walk out terhadap rapat paripurna DPRD beberapa hari lalu, dan keputusan itu harus kita hormati. Mereka juga tidak berniat sedikitpun memboikot pelaksanaan rapat paripurna. Sedangkan anggota DPRD lainnya, ketidakhadiran mereka dikarenakan sedang sakit atau izin," ucapnya seraya tersenyum. (psa)